

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang penelitian ini, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Untuk memberikan pemahaman terhadap objek yang diteliti dan menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan output nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh perubahan faktor-faktor produksi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

Pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*Quantitative Change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nilai akhir pasar (*Total Market Value*) dari barang akhir dan jasa (*Final Goods and Service*) yang di hasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor neto.

Menurut (Sukirno, 2015) PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai tambah produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara. Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah maupun negara.

Menurut BPS (2022) bahwa PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. PDRB adalah nilai-nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Seperti yang telah diuraikan di atas, angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah

tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu menunjukkan akan keberhasilan suatu aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

2.1.1.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan sebagai berikut :

- a) Kenaikan / penurunan riil, yaitu tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
- b) Kenaikan / penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melihat perkembangan PDRB di suatu wilayah.

2.1.1.2 Kegunaan PDRB

Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

a. PDRB menurut sektor /lapangan usaha

Data PDRB ini dikelompokkan berdasarkan kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 9 sektor utama, yaitu pertanian, peternakan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri dan pengolahan; listrik, gas, air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.

b. PDRB menurut Penggunaan

Data PDRB penggunaan terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori atau stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

2.1.1.3 Data PDRB

Cara penyajian data PDRB yang telah dijelaskan di atas terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya

ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan suberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- 2) **PDRB Atas Dasar Harga Konstan**, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

2.1.1.4 Metode Perhitungan PDRB

Metode perhitungan PDRB terdiri dari dua metode yaitu Metode langsung yaitu metode penghitungan yang didasarkan pada data hasil survei atau sensus. Sedangkan metode tidak langsung didasarkan pada pengeluaran lembaga lain (contoh RT) untuk membiayai kegiatan LNPRRT berikut sebagai penjelasannya :

1) Metode Langsung

Dalam perhitungan metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *Production Approach*, *Income Approach* dan *Expend Approach*. Meski dengan tiga jenis pendekatan yang berbeda akan tetapi nantinya memberikan hasil perhitungan yang sama. Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut ini:

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga perhitungan melalui pendekatan nilai tambah (*Value Added*).

Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan dari sektor-sektor produktif.

Rumusnya : $Y = \sum P \cdot Q$

$$Y = P_1 \cdot Q_1 + P_2 \cdot Q_2 + \dots + P_n \cdot Q_n$$

Keterangan : P = harga produk dari sektor tertentu

Q = jumlah produk dari sektor itu.

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara (Tarigan, 2005)

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh

dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan yaitu:

$$\text{Rumusnya : } Y = YW + YI + YR + YP$$

Keterangan : W = upah

I = bunga

R = sewa

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expend Approach*)

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Cara perhitungan menurut pendekatan pengeluaran adalah dengan menggunakan semua pengeluaran.

$$\text{Rumusnya : } Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan : C = pengeluaran konsumsi

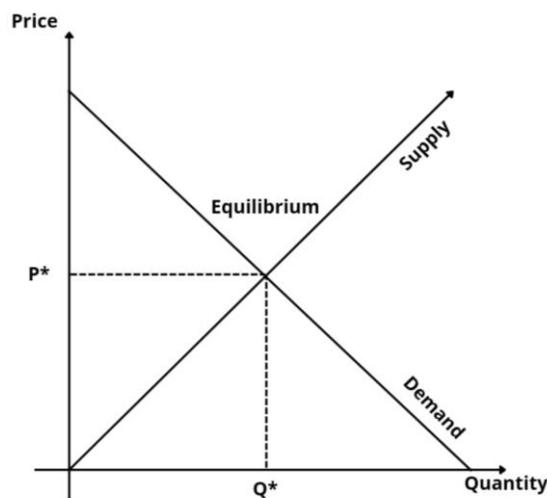
I = pengeluaran produsen (*Income*)

G = pengeluaran pemerintah

(X-M) = pengeluaran luar negeri/ekspor neto (ekspor impor).

Secara konseptual ketiga pendekatan tersebut nantinya akan menghasilkan jumlah atau angka yang sama. Sehingga jumlah belanja atau pengeluaran akan sama hasilnya dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama dengan total hasil pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

Dalam pengertian sederhana, ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tiga konsep yaitu banyaknya barang dan jasa yang diproduksi, besarnya pendapatan yang diterima dan penggunaan pendapatan tersebut. Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui suatu persamaan matematis sederhana. Pertemuan antara ketiga dimensi perilaku tersebut dikenal sebagai titik keseimbangan umum antara sisi penyediaan dan permintaan di tingkat makro/semi makro (*General Equilibrium*).



Gambar 5. *General Equilibrium*

Pada Gambar 5. menunjukkan pada tingkat harga dan output P_1 dan Q_1 , permintaan dan penawaran saling menyeimbangkan, dan terdapat keseimbangan umum. Teori keseimbangan umum mencoba menjelaskan perilaku penawaran,

permintaan, dan harga dalam perekonomian secara keseluruhan dengan beberapa atau banyak pasar yang berinteraksi, dengan berusaha membuktikan bahwa interaksi permintaan dan penawaran akan menghasilkan keseimbangan umum secara keseluruhan. Ketidakseimbangan yang terjadi antara dua titik tersebut diartikan sebagai surplus atau defisitnya suatu daerah.

Asumsi keseimbangan umum (*General Equilibrium*) adalah sebagai berikut:

- Kebiasaan dan selera konsumen tetap konstan.
- Tidak ada perubahan dalam teknik produksi.
- Semua perusahaan melakukan operasi yang berhubungan dengan bisnis di bawah kondisi yang persis sama.
- Skala hasil tetap konstan. Ada lapangan kerja penuh sumber daya, termasuk tenaga kerja.
- Pendapatan konsumen tetap konstan.
- Faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan) tetap bergerak sempurna di antara berbagai tempat dan pekerjaan.
- Setiap unit dari suatu produk jasa adalah sama.
- Persaingan sempurna ada di pasar jasa, barang, dan faktor.

PDRB sisi sektoral (penyediaan) pada intinya menjelaskan tentang besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi yang berada di wilayah yang bersangkutan. Dari sisi ini dapat diketahui data agregat turunannya seperti struktur ekonomi (harga berlaku), pertumbuhan ekonomi (harga konstan) dan indeks implisit PDRB. Selain itu, dapat pula dihitung PDRB per kapita, sebagai

indikator yang menjelaskan tingkat kemakmuran rata-rata orang per orang yang diperoleh dari hasil pembangunan ekonomi.

Dilihat dari sisi permintaan atau penggunaan akhir, PDRB menurunkan agregat-agregat makro mengenai struktur/komposisi permintaan atau penggunaan akhir masing-masing komponen, pertumbuhan riil, serta indeks implisit. Komponen penggunaan akhir meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori/persediaan, serta transaksi luar negeri/luar daerah (ekspor dan impor). Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatannya, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga untuk investasi. Selain itu juga dapat diketahui besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap wilayah lain dalam bentuk perdagangan barang dan jasa (transaksi eksternal).

Dengan demikian apabila pengukuran PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, maka secara langsung akan ditunjukkan adanya keterkaitan antara nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dengan pendapatan yang diterima, serta bagaimana berbagai institusi (rumah tangga, swasta dan pemerintah) menggunakan pendapatannya untuk membiayai pengeluarannya. Selain itu untuk menghitung pengaruh luar negeri atau luar wilayah terhadap pendapatan masyarakat di wilayah tersebut harus pula diperhitungkan pendapatan neto luar negeri wilayah (pendapatan yang diterima domestik dikurangi yang dibayar ke luar wilayah), serta transaksi transfer berjalan untuk memperoleh gambaran tentang pendapatan yang benar-benar diterima di wilayah (pendapatan *disposabel*).

2) Metode Tidak Langsung (Alokasi)

Definisi dari metode tidak langsung adalah suatu perhitungan yang diperoleh dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan cara mengalokasikan nilai tambah dalam masing-masing kelompok aktivitas atau kegiatan ekonomi di tingkat regional (daerah) karena pengalokasian yang digunakan adalah yang paling bergantung atau paling dekat hubungannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional dalam suatu provinsi dapat diukur dengan tujuan untuk melihat peningkatan pendapatan yang terjadi pada masyarakat.

Pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda.

1) Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga tahun dasar dan hasilnya merupakan output dan biaya antara tahun berjalan. Dalam praktiknya sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang dipergunakan karena terlalu banyak komponen input yang dicakup, selain itu data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut.

Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output tahun berlaku dengan rasio tetap biaya antara terhadap output tahun dasar.

2) Ekstrapolasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produk yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indeks produksi (seperti jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, dll.) yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan pada penghitungan output atas dasar harga konstan, selanjutnya dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

3) Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagikan nilai tambah atas dasar nilai berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang dipergunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen, dan sebagainya.

Indeks harga dapat juga digunakan sebagai inflator dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga-harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

4) Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini yang dapat dideflasikan adalah output dan biaya antaranya, sedang nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga

perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditasnya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

Pada kenyataannya, sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, di samping karena komponennya terlalu banyak, juga karena belum tersedianya data secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui melalui berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi
- b. Gambaran struktur perekonomian
- c. Perkembangan pendapatan per kapita
- d. Tingkat kemakmuran masyarakat
- e. Tingkat inflasi dan deflasi.

Sehingga PDRB dapat digunakan untuk menggambarkan pembangunan atau perkembangan ekonomi pada suatu daerah dan juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam memberikan evaluasi dan perencanaan pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN secara nasional dan APBD secara daerah. Tujuan kebijakan fiskal ini untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja serta mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mangkoesoebroto, (2012) pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah permintaan akan barang publik dan yang mempengaruhi ketersediaan barang publik. Jumlah barang publik yang ada dapat mengakibatkan permintaan atas barang lainnya.

Adapun 2 teori Pengeluaran Pemerintah yaitu pada perekonomian makro dan pada perekonomian mikro, sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah pada Perekonomian Makro

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynesian akan ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan salah satu unsur dari permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G menyatakan pengeluaran pemerintah

(*Government Expenditures*), *I* investment, *X-M* adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai *G* terhadap *Y* serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional.

Sehingga formula tersebut menjelaskan terjadinya kenaikan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor akan menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap PDRB. PDRB yang meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Begitu sebaliknya, terjadinya penurunan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta net ekspor akan menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap PDRB. PDRB yang menurun akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah.

Teori ekonomi Keynes juga memperkenalkan sebuah konsep baru yaitu angka pengganda (*Multiplier*). Konsep ini menunjukkan bahwa kenaikan sedikit investasi akan menghasilkan *full employment*. Pada akhirnya, adanya kenaikan investasi maupun pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pengeluaran agregat berkali-kali lipat (Skousen, 2015). Rumus Keynes untuk *Multiplier* (*k*) adalah :

$$k = \frac{1}{1 - MPC}$$

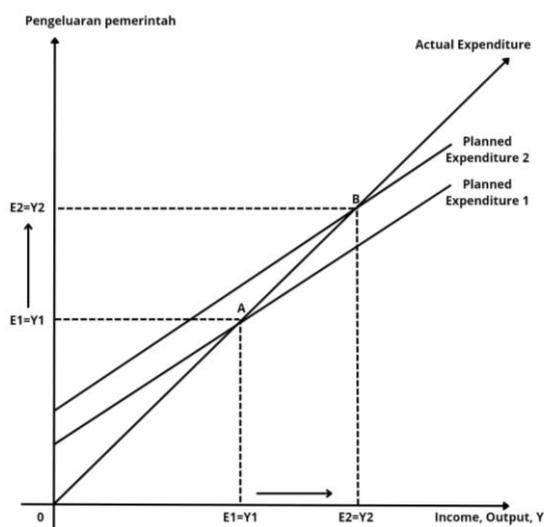
Dimana *MPC* = *Marginal Propensity to Consume* (kecenderungan marginal untuk mengonsumsi).

Kecenderungan mengonsumsi marjinal adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan *disposabel* bertambah satu unit.

Fungsi persamaan MPC:

$$MPC = \frac{\partial C}{\partial Y_d}$$

Jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar daripada tambahan pendapatan *disposable*, Sehingga angka MPC tidak akan lebih besar dari satu. Angka MPC juga tidak mungkin negatif, dimana jika pendapatan disposable terus meningkat, konsumsi terus menurun sampai nol (tidak ada konsumsi). Sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Karena itu $0 < MPC < 1$. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003)



Gambar 6. Pengeluaran Pemerintahan pada *Keynesian Cross*

Pada gambar 6. dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat

output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Teori yang dikembangkan *Rostow* dan *Musgrave* yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetaplah dibutuhkan, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Pada tahap lanjut, *Rostow* berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat, infrastruktur dan sebagainya (Sukirno, 2006).

Menurut *Peacock and Wiseman* mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori ini dikenal dengan *The Displacement Effect* dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah sengaja memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka

membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori ini didasarkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. Dimana peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser titik keseimbangan pendapatan nasional pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan begitu semakin besarnya pengeluaran pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

2. Pengeluaran Pemerintah pada Perekonomian Mikro

Dalam teori mikro pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Pengeluaran Negara dan Pengeluaran Daerah, sebagai berikut:

1) Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran yang membiayai program-program yang ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat :

Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi tiga, yakni:

a. Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi:

1. Pengeluaran untuk belanja

Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.

2. Pengeluaran untuk pembiayaan

Pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dll.

b. Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBD digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi:

• **Belanja Modal.**

Belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

- **Belanja Operasi**

Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya.

- c. **Pemerintah Kabupaten/Kota**

APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan. Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

Sedangkan **menurut sifatnya**, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain :

- a. **Pengeluaran Investasi**

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll.

- b. **Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat**

Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk

pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll.

c. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

2) Pengeluaran Daerah

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola atau mengatur keuangan daerah itu sendiri. Pengeluaran terbesar pengeluaran pemerintah daerah diperuntukkan bagi pendidikan. Dimana tentunya tenaga kerja terdidik dapat menaikkan produktivitas suatu perekonomian.

Selain itu, pemerintah daerah pula membelanjakan untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum, antara lain : pemadam kebakaran, polisi pengamanan, saluran selokan, pengawasan umum, taman-taman dan rekreasi. Dana pengeluaran daerah

tersebut dikeluarkan pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, maka pemerintah dalam mempergunakan uang dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya haruslah berpedoman kepada prinsip-prinsip pokok pengeluaran pemerintah (*Cannons of Government Expenditure*).

2.1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, usaha pengembangan penanaman modal dalam negeri telah dirintis oleh pemerintah, dengan kebijakan kredit investasi. Pemberian kredit investasi memerlukan keahlian dalam prioritas pembangunan. Sebuah pengalaman

menunjukkan bahwa penyaluran kredit investasi sering didasarkan pada perintah atau komando dari atasan. Hal demikian telah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dimana terjadi pemborosan keuangan negara dan pengaruhnya kepada laju inflasi.

Berdasarkan **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal **Pasal 1 Ayat 2** menyebut bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal dengan tujuan untuk mendirikan suatu usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan langsung oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri.

2.1.3.1 Pihak yang menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu:

- a. Perseorangan WNI
- b. Badan Usaha Indonesia
- c. Pemerintah Indonesia

2.1.3.2 Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) adalah :

- a. BUMN
- b. BUMD
- c. Perseroan Terbatas (PT)
- d. Badan Usaha Koperasi
- e. Firma (fa)
- f. Perseorangan
- g. *Commanditaire Vennotschaap* (CV)

2.1.3.3 Faktor yang mempengaruhi PMDN adalah :

- a. Adanya potensi dan karakteristik yang di miliki pada suatu daerah
- b. Pemanfaatan era otonomi daerah
- c. Budaya masyarakatnya

2.1.3.4 Permohonan PMDN

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap dua dengan menggunakan formulir Model I/PMDN. Formulir Model I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermudah calon investor domestik untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus di isi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:

1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi per tahun, pemasaran per tahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.

Adapun manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu :

- a) Menghemat devisa
- b) Mendorong kemajuan industri dalam negeri
- c) Mengurangi ketergantungan negara terhadap produk asing
- d) Memberikan kontribusi sebagai upaya penyerapan tenaga kerja.

2.1.4 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja. Menurut **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1** tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan pengertian tenaga kerja dijelaskan dalam **Pasal 1 Ayat 2** bahwa, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi atau sedang tidak melakukan kegiatan bekerja.

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional menjadi faktor yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian. Dengan itu, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses memproduksi barang dan jasa karena sumber daya manusia sebagai penggerak kegiatan usaha produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan permintaan barang ataupun jasa yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah ataupun wilayah.

Namun ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah ataupun kota mengakibatkan tidak meratanya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Juga ketidakmerataan tenaga kerja mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Sehingga akan menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi yang maksimal. Dengan itu, pemerintah harus memperluas kesempatan kerja sehingga penyerapan tenaga kerja merata untuk mengatasi penghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional dan pengangguran yang meningkat.

Kesempatan kerja dapat tercipta jika terjadi permintaan akan tenaga kerja di pasar kerja. Besarnya tenaga kerja dalam jangka pendek tergantung dari besarnya efektivitas permintaan untuk tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan substitusi antara tenaga kerja dan faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan akan hasil produksi, dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya. Dalam statistik ketenagakerjaan di Indonesia kesempatan kerja merupakan terjemahan bagi *employment* yang berarti sebagai jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. <i>Ekonomi Pertahanan</i> , 4(2).	Menggunakan variabel Independen Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja.	Menggunakan variabel Independen Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa	Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015.
2.	Husna, H. N., Laut, L. T., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2004-2018. <i>DINAMIC: Directory Journal of Economic</i> , 2(2), 318–334.	Menggunakan variabel Independen Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja dan variabel Dependen PDRB	Menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2004-2018.
3.	Wulansuci, A. (2021). Analisis Pengaruh PAD, PMA, PMDN, Dan Angkatan Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2013-2019.	Menggunakan variabel Independen PMDN dan variabel Dependen PDRB	Menggunakan variabel Independen PAD, PMA dan Angkatan kerja	PAD, PMDN, Angkatan Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Yogyakarta sedangkan untuk PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
4.	Kurniawati, V., Pudjihardjo, M., & Sakti, R. K. (2018). Analisa Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang. <i>Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan</i> , 18(1), 50–64.	Menggunakan variabel Independen Tenaga Kerja	Menggunakan variabel Independen Nilai Ekspor dan Nilai Investasi Pada Industri Pengolahan dan variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi	Untuk industri pengolahan makanan, jumlah tenaga kerja bernilai negatif dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai ekspor dan nilai investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.	Maisaroh, M., & Risyanto, H. (2018) Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Banten. <i>EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis</i> , 1 (2), 206-221.	Menggunakan variabel Independen Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Variabel Dependen PDRB	Menggunakan Variabel Independen Investasi	Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama periode 2010-2015.
6.	Puspitasari, D. (2016) Pengaruh Investasi	Menggunakan Variabel	Menggunakan variabel	Investasi Publik, Investasi Swasta,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Publik, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Regional di Provinsi Jawa Timur.	Independen Tenaga Kerja	Independen Investasi Publik, Investasi Swasta dan variabel Dependen Pendapatan Regional	Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Regional di Provinsi Jawa Timur.
7.	Rustiono, D.(2008) Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah.	Menggunakan variabel Independen Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah	Menggunakan Variabel Independen Investasi dan variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah.	Angkatan Kerja, Investasi Swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah.
8.	Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. <i>Jurnal Akuntansi Bareleng</i> , 3(1), 21–31.	Menggunakan variabel Independen Tenaga Kerja	Menggunakan variabel Independen Investasi dan variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.	Investasi berpengaruh positif dan signifikan dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam periode 2012-2016.
9.	Setijawan, B., Anwar, N., & Suharno, S. (2021). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa	Menggunakan variabel Independen Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah	Menggunakan variabel Independen Investasi dan variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi di	investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tengah. <i>J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)</i> , 6(2), 332–337.		Provinsi Jawa Tengah.	ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019.
10.	Pertiwi, Y. A. M. (2021). Analisis Pengaruh PMA, PMDN, Jumlah Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Infrastruktur Terhadap PDRB di Indonesia Tahun 2015-2019 (<i>Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta</i>).	Menggunakan variabel Independen PMDN, jumlah tenaga kerja dan variabel dependen PDRB	Menggunakan variabel Independen PMA, Belanja Modal dan Infrastruktur	PMA dan Infrastruktur Jalan tidak signifikan terhadap PDRB, sedangkan PMDN, Jumlah Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Infrastruktur Listrik berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Indonesia.
11.	AJI, A. O. B (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Yogyakarta.	Menggunakan variabel Independen Penanaman Modal Dalam Negeri	Menggunakan variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Asing, Angkatan Kerja dan variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta. Namun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta.
12.	Syahrani, F. R. (2011). Pengaruh penanaman	Menggunakan variabel	Menggunakan variabel	PMDN, PMA dan utang luar negeri

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1985-2009. <i>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah</i> .	Independen Penanaman Modal Dalam Negeri	Independen Penanaman Modal Asing, Utang Luar Negeri dan variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi	dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia meskipun PMA tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
13.	Chaerani, N. (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pulau Jawa (<i>Disertasi Doktor, Universitas Siliwangi</i>).	Menggunakan variabel Independen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Variabel Dependen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Menggunakan variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	PAD, Dana Perimbangan maupun PMDN mempengaruhi PDRB provinsi di Pulau Jawa periode 2010-2017.
14.	Rahman, AJ, Soelistyo, A., & Hadi, S. (2016). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014. <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan</i> , 14 (1), 112-121.	Menggunakan variabel Independen pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan variabel dependen PDRB	Menggunakan variabel Independen investasi	Secara bersama-sama Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Namun, parsial menunjukkan bahwa Investasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB.
15.	Afdal, F. (2018). Pengaruh Investasi Asing Langsung, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto Pada 33 Provinsi Di Seluruh Indonesia.	Menggunakan variabel Independen, PMDN dan Tenaga Kerja	Menggunakan variabel Independen Investasi Asing Langsung dan variabel Dependen Produk Domestik Bruto	Pengaruh Investasi Asing Langsung, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan Produk Domestik Bruto Pada 33 Provinsi Di Seluruh Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat didefinisikan bagaimana pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yaitu bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB di setiap Provinsi di Indonesia.

2.3.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar

pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah (Sukirno, 2015).

Pemerintah memiliki kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran sehingga dapat terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan adalah belanja pembangunan karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan seperti jalan, jembatan dan sarana sektor ekonomi lainnya. Sehingga hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan PDRB adalah positif. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka pertumbuhan PDRB juga akan meningkat, dan sebaliknya jika pengeluaran pemerintah rendah maka pertumbuhan PDRB pun akan rendah.

2.3.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peran investasi terhadap produksi memang sangat besar karena investasi merupakan penggerak dari roda perekonomian. Investasi baik berasal dari modal

asing ataupun modal dalam negeri secara sederhana berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga investasi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum jika investasi meningkat maka PDRB suatu daerah cenderung akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Di negara berkembang, keberadaan investasi sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara tidak dapat terlepas oleh investasi baik investasi yang berasal dari asing maupun investasi dalam negeri (domestik) untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Definisi Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan belanja modal yang dilakukan untuk membeli barang-barang produksi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang ada dalam perekonomian yang bersumber dari pihak-pihak terkait seperti badan usaha dalam negeri, pemerintah dan perseorangan yang masih atau berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Investasi dalam negeri menghimpun akumulasi modal yang dialokasikan untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi, melalui pembangunan tersebut nantinya akan berdampak pada potensi output suatu negara atau daerah yang akan mengalami peningkatan, karena dengan adanya peningkatan penanaman modal akan mendorong kemajuan industri dalam negeri, dengan begitu penyerapan tenaga kerja akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Sehingga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan PDRB. Dengan semakin banyaknya investor menanamkan modalnya di dalam negeri maka semakin besarnya Penanaman Modal Dalam Negeri pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

2.3.3 Hubungan Tenaga Kerja dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

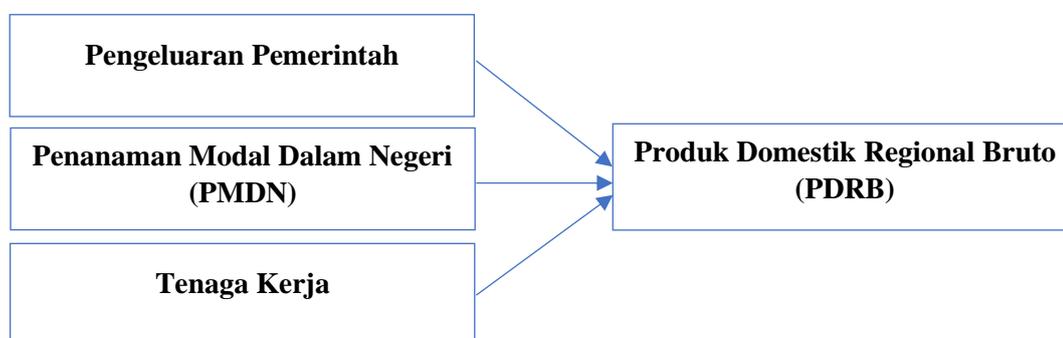
Tenaga kerja sebagai sumber ekonomi paling penting untuk menghasilkan produksi dalam kegiatan perekonomian. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap diimbangi dengan input tenaga kerja yang keterampilan, pengetahuan dan disiplin merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan begitu perekonomian maka semakin besar pula kuantitas output produksi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan nilai tambah PDRB. Ketika pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif hal tersebut harus diimbangi dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang memadai atau lapangan pekerjaan yang luas, jika tidak akan mengakibatkan tenaga kerja akan terabaikan sehingga tingkat pengangguran bertambah.

Peningkatan tenaga kerja memberikan peningkatan pula terhadap pertumbuhan ekonomi yang sejalan pula dibuktikan melalui penelitian (Pambudi & Miyasto, 2013) yang menyatakan bahwa angkatan kerja memiliki peran penting atau dapat dikatakan signifikan karena angkatan kerja memengaruhi laju pertumbuhan

ekonomi. Sehingga jumlah tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan PDRB. Dengan demikian, banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia, berarti dapat menambah jumlah tenaga kerja produktif melalui tenaga kerja yang terampil sehingga produksi akan meningkat, yang berarti akan meningkatkan pula pertumbuhan PDRB.

Ketiga variabel tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian tingkat Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja dapat dijadikan indikator dalam peningkatan PDRB.

Maka, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, berikut ini adalah gambar kerangka yang sistematis :



Gambar 7. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, maka dilakukan hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pernyataan dikemukakan masih lemah kebenarannya.

Dari uraian permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diduga Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Tenaga Kerja berpengaruh positif secara parsial terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021.
2. Diduga Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Tenaga Kerja berpengaruh bersama-sama (simultan) terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021.